

Rincian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

### A. KERANGKA REGULASI

#### 1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2022
2	PRPP Tentang Irigasi	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023
3	RPP Tentang Sumber Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023

#### 2. Direktorat Jenderal Bina Marga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
<b>1.</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Jalan Nasional</b>				
1.1	Penyusunan SK Dirjen Bina Marga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	Merupakan pelaksanaan dari amanat Permen PAN RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan			
<b>2</b>	<b>Penguatan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan</b>				
2.1	Peninjauan Kembali Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	<p>Amanat PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada pasal 61 dan pasal 62 Diperlukan penajaman dan penambahan dalam pengaturan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka waktu dalam penetapan fungsi dan status agar tidak terjadi jeda waktu terlalu panjang antara SK Menteri dengan SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota</li> <li>2. Konsekuensi logis terhadap administrasi dan hukum dari penetapan fungsi dan status jalan daerah</li> <li>3. Pertimbangan teknis dan administratif pengusulan perubahan fungsi dan status jalan agar tidak terlalu politis</li> </ol>	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.2	Revisi SK No. 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK No. 77/KPTS/DB/1990 masih menggunakan sejumlah asumsi perhitungan yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait penyelenggaraan jalan (idealnya disediakan pula petunjuk teknis untuk jalan provinsi dan jalan kota)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
2.3	Penyusunan konsep Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penugasan Penanganan Ruas Jalan daerah dengan Pendanaan APBN	<p>Amanat PP 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pada pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.</li> <li>2. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri			
<b>3</b>	<b>Penguatan Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)</b>				
3.1	Revisi Permen PUPR 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Belum ada pengaturan atau dasar hukum terkait penunjukkan BUMN untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian jalan tol, serta mekanisme pengambilalihan perusahaan jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022
3.2	Penetapan Permen PUPR tentang Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pengusahaan Jalan Tol	Belum ada pedoman yang mengatur mengenai kebijakan terkait dengan besar/nilai serta bentuk dukungan dan jaminan dari Pemerintah dalam meningkatkan kepastian usaha jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022
3.3	Revisi Permen PUPR 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Belum diatur tentang konsekuensi serta kewajiban para pihak mengenai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol (jika harus penilaian terbukti SPM di suatu ruas jalan tol tidak terpenuhi)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.4	Penetapan Permen PUPR tentang Perubahan Rencana Usaha dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Belum diatur tentang perubahan rencana usaha dalam perjanjian pengusahaan jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020
3.5	Penetapan Permen PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha	Belum diatur tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas rencana badan usaha di dalam Peraturan Menteri PUPR	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020-2021
3.6	Revisi Permen PUPR 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian peraturan tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol terkait dengan pengembangan Tempat Istirahat	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020-2021
3.7	Revisi Permen PUPR no 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian atas transaksi tol non tunai di jalan tol terkait dengan MLFF	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020
<b>4 Standarisasi teknis dan pedoman penyelenggaraan jalan</b>					
4.1	Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. 1. Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknis dan prosedural pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan, serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>dokumen perencanaan lainnya, namun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Diperlukan review terkait pemangku kepentingan dalam pelaksanaan konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis.</li> <li>3. Diperlukan review terkait acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis.</li> <li>4. Diperlukan penjelasan terkait hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan rencana strategis (K/L maupun unit organisasi).</li> </ol>			
4.2	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Rencana umum Jangka Panjang dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan pada periode jangka panjang (indikasi 5 tahunan) maupun jangka menengah (indikasi tahunan).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.3	Penetapan Permen PUPR tentang Penetapan Rencana Umum Jalan Tol	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 12 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan tol pada periode waktu sesuai yang akan ditetapkan dalam Rakepmen.	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jalan Bebas Hambatan</li> <li>• Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</li> </ul>	2021
4.4	Penyusunan Permen PU Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	Belum ada SPM untuk bidang jalan sesuai ketentuan dalam PP 34/2006 tentang Jalan Pasal 113	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
4.5	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Kelas Jalan Nasional	Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan</li> <li>• Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I</li> </ul>	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II</li> </ul>	
4.6	Revisi Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 102 PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik	2022
4.7	Revisi Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 106 dalam PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan</li> <li>• Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I</li> <li>• Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II</li> </ul>	2022



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.8	Revisi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997	Manual ini perlu dilakukan pembaruan karena telah cukup lama diterbitkan (1997).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2023
<b>5 Kebijakan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan jalan</b>					
5.1	Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan ( <i>Road fund</i> )	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam penyusunan PP ini, diperlukan Kerjasama dan koordinasi bersama Kementerian perhubungan dan Kementerian keuangan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024
5.2	Penyusunan Perpres Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 3 pada PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/ Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
5.3	Penyusunan Regulasi Tentang penerapan <i>Green Road</i>	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pasal 7 pada Permen PU 05 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
<b>1</b>	<b>Air Minum Dan Sanitasi</b>				
1.1	RPP tentang Sistem Penyediaan Air minum	UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
1.2	RPP tentang Air Limbah Domestik	Kebutuhan payung hukum lebih tinggi bagi penyelenggaraan air limbah domestik dan bersifat komprehensif pengelolaannya, serta memberikan urgensi bagi Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Sanitasi, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
1.3	Rapermen PUPR tentang Kriteria Pemanfaatan Dalam Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Sistem Penyediaan Air Minum	PP 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu telah diamanatkan bahwa dibutuhkan pengaturan terkait pemberian fasilitas pajak	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.			
1.4	Rapermen PUPR tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Perpres 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
1.5	Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Sanitasi, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2023
<b>2</b>	<b>Permukiman Dan Penataan Bangunan</b>				
2.1	Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.2	RPP Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.3	Revisi PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembaruan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, serta mengangkat pengaturan Bangunan Gedung yang diatur dalam Permen ke Peraturan Pemerintah	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
2.4	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	UU Nomor 6/2017 tentang Arsitek	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.5	Raperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Kawasan Permukiman	– UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		- UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah		Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	
2.6	Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.7	Rapermen PUPR tentang Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	PP Nomor 14/2016 tentang Penyelenggaraan PKP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021

4. Direktorat Jenderal Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021
2	RPP tentang Badan Pelaksana rumah umum	Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2024
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2022
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat			Direktorat Rumah Umum dan Komersial	
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Khusus	2021
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Swadaya	2021
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2022
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Amanat PP 14 Tahun 2016	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2020
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem	2021



<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Unit Terkait/ Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
				dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unor di Kementerian PUPR	2020
2	Revisi Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kementerian PUPR	2020-2021
3	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
5	Pedoman Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		
6	Pedoman Penyusunan Dokumen Transaksi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024
7	Pedoman Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
8	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
9	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
10	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020
11	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021
13	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
14	Pedoman Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
15	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
16	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
17	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2022

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR	Rencana Aksi PUPR sebagaimana Agenda PUPR dengan Komisi Penyedikan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali	Sekretariat BPIW	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2020
2	Rancangan Teknokratis Renstra PUPR 2025 – 2029	acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2024
3	Rancangan Teknokratis Renstra BPIW 2025 – 2029	acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan program infrastruktur wilayah pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029	Sekretariat BPIW	Internal BPIW	2024
4	Pedoman Pelaksanaan Rakorbangwil	Acuan pelaksanaan Rakorbangwil (termasuk peran tugas dan fungsi anggota Forum Rakorbangwil)	Sekretariat BPIW	Internal BPIW	2021
5	Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang	Acuan penyusunan Program Jangka Panjang (RPIJP)	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPIW dengan melibatkan Unor	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah	Acuan penyusunan Program Jangka Menengah (RPIJM)	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPIW dengan melibatkan Unor	2021
7	Rapermen tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional	Acuan pelaksanaan tugas, fungsi, pengukuran kinerja Jabatan Fungsional termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional	Sekretariat BPIW	Internal BPIW	2021

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, OJK, BKPM, LKPP, kemenaker, Kemenkumham, Setneg, Setkab, Kemen ESDM, Kemen Perhubungan	2020
2	Rapermen tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Tindak lanjut Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, LKPP, Kemenkumham	2020
3	Rapermen tentang Subklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, BPS, Kemenkumham	2020
4	Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja dan Laporan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemenkumham	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi				
5	Rapermen tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemenkumham	2021-2022
6	Rapermen tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Permohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, BNSP, Kemenaker, Kemenkumham	2020
7	Rapermen tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Badan Akreditasi Nasional, Kemenkumham	2020-2021
8	Rapermen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemnaker, BNSP, Kemenkumham	2020-2021



<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Unit Terkait/ Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan				
9	Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Pusdatin, Kominfo, Kemendagri, Kemenkumham	2020-2021

8. Inspektorat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Permen PUPR No25/PRT/M/2017	Reorganisasi Inspektorat Jenderal dan Klasifikasi jenis penugasan sesuai dengan standar AAIP	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
2	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017	Perubahan Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020
3	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	Perubahan Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020
4	Rapermen Audit Khusus dan Audit Investigatif	Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
5	Rapermen Pedoman Evaluasi SPIP	Pedoman pelaksanaan Evaluasi SPIP di Kementerian PUPR	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
6	Rapermen Temuan Audit Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024

9. Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rapermen PUPR tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.</li> <li>▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> <li>▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</li> </ul> <p>Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan SPBE untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di Kementerian.</p>	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020
2	Rapermen tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR	Amanat Rancangan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, RUU Penanggulangan Bencana pengganti UU No. 24 Tahun 2007	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Rapermen tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR	Amanat PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Biro PAKLN	Kementerian Keuangan, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024
4	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR</li> <li>▪ Menambahkan tata cara evaluasi penyelenggaraan SAKIP di dalam lampiran</li> </ul>	Biro PAKLN	Kementerian PAN dan RB, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024
5	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yg efektif &amp; efisien, pencipta arsip membuat <b>tata naskah dinas</b>, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan &amp; akses arsip”.</li> <li>▪ Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas</li> </ul>	Biro Umum	Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (saat ini sedang direvisi)</li> </ul>			
6	<p>Rapermen PUPR tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; yang mengatur tentang jadwal retensi/masa simpan arsip dan klasifikasi keamanan akses arsip dinamis</p>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; kewajiban bagi Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri untuk menyusun 4 (empat) pilar Kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JRA sebagai prasarana penyusutan arsip, yang menentukan masa simpan arsip dan nasib akhir arsip (Permanen atau Musnah)</li> <li>▪ SKKAAD sebagai prasarana pemberian hak akses arsip oleh pejabat yang berwenang, sekaligus untuk publik mana yang dapat melihat arsip.</li> </ul>	Biro Umum	Arsip Nasional RI dan Unit-Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Rapermen PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul> </li> <li>▪ Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dibuat untuk melengkapi dan mengganti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.</li> <li>▪ Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah dalam</li> </ul>	Biro Komunikasi Publik	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		memberikan layanan informasi publik.			
8.	Rapermen PUPR tentang Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>▪ Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna barang perlu meningkatkan tertib pengamanan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> </ul>	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020
9.	Rapermen PUPR tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> </ul>	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2021
10	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PUPR yang Merupakan Kewenangan Sendiri yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapermen ini merupakan Perubahan Permen PU Nomor 14 Tahun 2011 dan Permen PU Nomor 15 Tahun 2011 dalam</li> </ul>	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Dilaksanakan Sendiri dan/atau Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (dan perubahannya) Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR		Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	
11	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Biro Keuangan	BPKP, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023